

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DAERAH DI SKPD BERUPA KOMPTENSI SUMBER
DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH**

Universitas Djuanda, Program Studi Akuntansi

Rieska secar islamiah

Email : Islamisekar220@gmail.com

ABSTRAK

Laporan keuangan yang berkualitas menandakan bahwa informasi yang terkait didalamnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, karena Laporan tersebut sudah relevan dan sesuai dengan standar Akuntansi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah kompetensi sumber daya manusia, penerapan laporan keuangan daerah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah di SKPD. Yaitu dengan ditandai masih sedikitnya tenaga kerja akuntansi pada pemerintahan daerah yang mampu memahami laporan akuntansi keuangan daerah sesuai dengan SAP sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi Laporan kualitas keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis berganda yaitu kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian kompetensi Sumber daya manusia dan penerpapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh penting terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni dengan ditunjukkan hasil yang signifikan positif terhadap kedua variable tersebut.

Kata Kunci: kompetensi SDM, Penerapan SAP, LKPD

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah memainkan peran penting dalam memastikan kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola anggaran dan menyajikan laporan

keuangannya kepada publik. Dalam artikel ini, bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD

Dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berupa aturan-aturan akuntansi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah .

Diatur pada PP di nomor 58 pada tahun 2005. Yaitu ketentuan yang diatur dengan sistem pencatatan akuntansi keuangan daerah. Dengan mengikuti sistem pencatatan akuntansi yang dimulai dari proses mengumpulkan data, melakukan pencatatan, melakukan pengikhtisaran , sampai dengan pembuatan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan APBD nya. Dalam penerapan sistem akuntansi mempunyai 4 karakter kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami dimana laporan keuangan nya dapat dipahami oleh si pemakai mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis , relevan dalam memberikan informasi sehingga informasi tersebut dapat digunakan dan bisa dibandingkan untuk membandingkan peristiwa dimasalalu dan masa kini , dan yang terakhir adalah ke handalan

Laporan keuangan tersebut nanti nya akan diperiksa setahun sekali oleh pihak BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengetahui laporan keuangan itu sudah sesuai dengan prosedur dan tidak terdapat kecurangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap tahun nya para akuntan publik dapat membenahi apa saja yang kurang dalam laporan keuangan daerah ini dari tahun sebelumnya dan kita dapat melakukan sebuah perbandingan yang nantinya dilakukan analisis laporan keuangan daerah

Bisa dilihat bahwa Pengelola keuangan pada pemerintah daerah pada saat ini mulai ada peningkatan akan tetapi tetap perlu dilakukan evaluasi, terlebih pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Masih ada beberapa tenaga kerja akuntan publik yang masih belum mengerti akan prosedur dalam menyajikan

laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah. Hal tersebut menjadi halangan dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas.

Maka dari itu di untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam laporan keuangan diperlukan tenaga kerja akuntan yang ahli serta handal , menurut hutapea dan thoha (2008 ;28) Terdapat 3 kemampuan yang harus dimiliki yang pertama Adalah Pengetahuan (knowledge) akan membuat laporan keuangan daerah apa saja yang harus dicatat sehingga dapat terbaca informasi didalamnya dan sesuai Yang kedua adalah Keterampilan (Skill) Merupakan kemampuan nya akan membuat laporan keuangan daerah yang baik . Dan yang terakhir adalah Sikap (attitude) merupakan Orang yang memiliki perilaku yang baik dalam menaati segala peraturan dan prosedur perusahaan. Kemampuan tersebut bisa didapatkan dengan menempuh pendidikan Akuntansi pada perguruan tinggi ,ikut dalam pelatihan/workshop ,dan juga perbanyak pengalaman dalam bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data dari daftar pertanyaan kuisioner yang nantinya akan di isi oleh para responden. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for Social). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu analisis regresi berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah**
hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari hasil uji Hipotesis pertama nya diterima. Dengan sumber daya manusia yang kompeten, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sehingga dapat dipastikan laporan keuangan yang disajikan akurat dan relevan sehingga menciptakan Laporan keuangan yang berkualitas. Dapat dilihat

dari kemampuan sumber daya manusia SKPD dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik, mulai dari mengajukan anggaran, melaporkan realisasi anggaran, dan melaporkan sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Sumber daya manusia yang kompeten juga dapat membuat laporan keuangan yang mudah dipahami oleh publik dan memastikan data yang disajikan memiliki kualitas dan validitas yang baik.

2. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di SKPD.

hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerepan sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan daerah di SKPD. Dapat dilihat dari pengujian hasil hipotesis ke 2 yaitu hipotesis nya diterima,Dengan Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik akan memudahkan SKPD dalam melakukan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan menghasilkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Sistem akuntansi keuangan daerah juga dapat membantu dalam menyiapkan laporan keuangan dengan mudah dan cepat serta memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak yang berwenang. Dalam penerapannya, sistem akuntansi keuangan daerah harus memperhatikan prinsip akuntansi yang berlaku, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, pengawasan, dan pelaporan keuangan

3. Pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah

Pengaruh kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama dapat mendorong kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD. Dengan bantuan SDM yang kompeten, SKPD dapat membangun sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan memastikan laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan sistem yang akurat,relevan dan terpercaya.

KESIMPULAN

Faktor kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang besar dalam memastikan kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD. SKPD harus memperhatikan pentingnya kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan dan bersiap untuk menghadapi perubahan regulasi keuangan yang berkembang di masa depan. Dengan demikian, SKPD dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

REFERENSI

Andini, D. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 26(1), 65-82.

Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 22-32.

Mentu, E., Sondakh, J. J. (2016). Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1392-1399.